

No. ISBN : 979.467.308.0
No. Publikasi : 1512.12.04

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) KERAWANAN SOSIAL DAN KRIMINAL

MENURUT KECAMATAN
DI SUMATERA UTARA
TAHUN 2003

BPS

BADAN PUSAT STATISTIK PROPINSI SUMATERA UTARA

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) KERAWANAN SOSIAL DAN KRIMINAL MENURUT KECAMATAN DI SUMATERA UTARA TAHUN 2003

No. ISSN : 979.467.308.0

No. Publikasi : 1512.12.04

Ukuran Buku : 8,5 inch x 11 inch

Jumlah Halaman :

Naskah / Gambar Kulit :

Bidang Statistik Kependudukan

Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara

Tim Penyusun Naskah :

Penanggung Jawab : H.M. Nasir Syarbaini, SE

Penanggung Jawab Teknis : Ir. Poltak Sutrisno Siahaan, Panusunan Siregar

Koordinator : Ir. Persadaan Sinulingga

Pengolah Data : Azantaro, Soni Sagita

Penulis : Drs. Ramlan, Marlise Simamora, SE, Sri Linda Murni Pasaribu, Azantaro,
Yunus, Soni Sagita, Sri, Joel Roy Perangin-angin

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara

Jl. Asrama No. 179 Telp. 8452343 8459966 - MEDAN [20123]

Bulan Desember 2004

Sumber Dana : Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah tahun 2004

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi “Sistem Informasi Geografis (SIG) Kerawanan Sosial dan Kriminal Menurut Kecamatan di Sumatera Utara Tahun 2003’ ini merupakan yang pertama kali diterbitkan khusus memberikan gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat yang dapat memicu munculnya kejahatan yang mengakibatkan kerawanan sosial.

Terbitnya buku “Sistem Informasi Geografis (SIG) Kerawanan Sosial dan Kriminal Menurut Kecamatan di Sumatera Utara Tahun 2003’ ini diharapkan agar semua pihak baik perencana, pelaksana maupun pengamat sosial ekonomi mendapatkan kejelasan mengenai kondisi wilayah sehingga kebijakan yang akan ditetapkan dapat disesuaikan. Perlu disadari bahwa data yang disajikan dalam publikasi ini masih sangat terbatas dan belum banyak mengungkap tentang permasalahan secara mendalam, untuk itu pada tahun yang akan datang diharapkan variabel maupun datanya akan lebih lengkap dan rinci.

Terwujudnya publikasi ini adalah berkat kerja sama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengupayakan terwujudnya publikasi ini baik langsung maupun tidak langsung diucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang sangat diharapkan.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Desember 2004

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROPINSI SUMATERA UTARA

H.M. NASIR SYARBAINI SE
Nip. 340003769

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	
1.2. Maksud dan Tujuan	
1.3. Metodologi	
1.3.1. Ruang Lingkup	
1.3.2. Sumber Data dan Keterbatasannya	
1.3.3. Pengolahan Data	
1.4. Kriteria Pengukuran Kerawanan per Kecamatan	
1.4.1 Sensus Podes 2003	
1.4.2 Sakerda 2003	
1.4.3 Penghitungan Tingkat Kerawanan Per Kecamatan	
II. KRIMINALITAS DAN PENGANGGURAN	5
2.1. Kerawanan Kriminalitas	
2.1.1. Kejahatan	
2.1.2. Konflik	
2.2. Kerawanan Pengangguran	
III. KERAWANAN SOSIAL DAN KRIMINALITAS MENURUT KECAMATAN	12
3.1 Analisa Kerawanan per Kabupaten/Kota	
3.2 Kemiskinan	
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	24
V. LAMPIRAN	25

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kerawanan sosial dan kriminalitas adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial yang sebab musababnya kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perlu kajian yang mendalam untuk melihat akar permasalahan dari kerawanan sosial tersebut.

Masyarakat Sumatera Utara, yang merupakan masyarakat majemuk menyimpan potensi kerawanan sosial. Kesenjangan sosial yang lebar akan membuat hubungan antar individu menjadi relatif renggang. Mereka menjadi sangat individual dan cenderung tidak acuh terhadap lingkungan sosial. Sikap tidak acuh terhadap potensi kerawanan sosial di sekitarnya itu bukan semata-mata disebabkan oleh karena ketakutan akan bahaya yang bakal menimpa, tetapi terutama disebabkan oleh lingkungan sosial yang individualis. Ini memang ciri khas masyarakat urban.

Kerawanan sosial adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang mudah menimbulkan gangguan keamanan atau bahaya. Perkembangan di dalam dan di luar manusia tertentu, mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk menciptakan kerawanan sosial. Jangan heran dan kaget apabila di siang bolong Anda menjadi korban kejahatan di jalanan, dan tidak ada seorang pun yang perduli. Orang-orang disekitar TKP (tempat kejadian perkara) malah pura-pura tidak melihat dan bergegas pergi. Inilah fenomena yang makin mewabah di kota-kota besar dan sekitarnya. Masyarakat tidak begitu perduli atau mungkin takut, sehingga tidak berani bertindak. Akibatnya pelaku kejahatan makin berani, brutal dan menganggap enteng pada calon korban dan masyarakat sekitar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kerawanan sosial, diantaranya adalah tingginya angka kriminalitas di daerah tersebut, jumlah pengangguran yang tinggi, jumlah penduduk miskin yang besar, adanya tempat-tempat terlarang seperti tempat perjudian dan tempat pelacuran/lokalisasi di daerah tersebut juga dapat memicu adanya potensi kerawanan sosial. Selain itu, keanekaragaman suku dan agama di daerah tersebut juga dapat mengakibatkan adanya pertentangan dan persaingan tidak sehat sehingga dapat memicu konflik antar suku atau agama. Namun karena

keterbatasan data yang tersedia di Badan Pusat Statistik menyebabkan tidak semua faktor-faktor penyebab kerawanan sosial diatas dibahas. Data yang dapat disajikan sampai tingkat kecamatan dalam analisis ini hanya data kriminalitas dan tingkat pengangguran, sedangkan untuk data kemiskinan hanya dapat disajikan sampai tingkat Kabupaten/Kota.

1.2. Maksud dan Tujuan

Sistem Informasi Geografis (SIG) kerawanan sosial dan kriminal dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat yang dapat memicu munculnya kejahatan sehingga dapat mengakibatkan kerawanan sosial.

Yang dimaksud dengan *kerawanan sosial dalam analisis ini adalah ketika seseorang, keluarga, lingkungan merasa terancam kepentingan atau kehidupannya dari segi keamanan, kebutuhan hidup dan akses terhadap fasilitas kelompok lainnya.*

Dari analisis kerawanan sosial ini diharapkan semua pihak yaitu perencana, pelaksana dan pengamat sosial ekonomi mendapatkan kejelasan mengenai kondisi wilayahnya sehingga dapat disusun kebijakan berdasarkan kondisi yang ada.

1.3. Metodologi

1.3.1. Ruang Lingkup

Sistem Informasi Geografis (SIG) Kerawanan Sosial dan Kriminal Sumatera Utara merupakan kajian deskriptif terhadap berbagai sumber seperti hasil Survei Angkatan Kerja Daerah 2003, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2003), data kriminalitas dari instansi terkait, serta data dari Sensus Podes 2003 yang diolah lagi yang menyajikan gambaran tingkat kerawanan di Propinsi Sumatera Utara menurut tingkat kecamatan untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

1.3.2. Sumber Data dan Keterbatasannya

Sumber data yang digunakan dalam penulisan Sistem Informasi Geografis Kerawanan Sosial dan Kriminal ini adalah :

- Hasil Survei Angkatan Kerja Daerah 2003.
- Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2003.
- Hasil Sensus Podes 2003
- Data Statistik Kriminal 2003.

Untuk kajian lebih lanjut menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2000 terutama tentang agama dan suku bangsa

1.3.3 Pengolahan Data

Data yang diolah dalam publikasi ini adalah data dari hasil Sensus Podes 2003 dan Sakerda (Survei Angkatan Kerja Daerah) 2003 dimana rincian data yang diambil dari Sensus Podes 2003 adalah yang berkaitan dengan kriminal dan kerawanan sosial yakni konflik dan kejahatan sedangkan dari Sakerda 2003 diambil tingkat penganggurannya. Data tersebut dihitung dan dipisahkan sampai tingkat kecamatan dan diklasifikasikan menurut tingkat kerawanan. Untuk kecamatan baru (pemecahan setelah tahun 2000), berbagai karakteristiknya mengikuti kecamatan induk dan penentuan suatu kecamatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1.4 Kriteria Pengukuran Kerawanan per Kecamatan

1.4.1 Sensus Podes 2003 :

1. Dihitung persentase desa/kelurahan dari setiap kecamatan yang mengalami konflik/kejahatan. Desa yang mengalami konflik/kejahatan tidak dibedakan dengan besar/kecilnya.
2. Dengan menggunakan program SPSS dihitung rata-rata (μ) dan standar deviasi (σ).
3. Setiap kecamatan diklasifikasikan tingkat kerawanannya baik yang konflik maupun kejahatan dengan kriteria sebagai berikut :

Cara Penghitungan :

- Tidak Rawan : $X \leq \mu - \sigma$
- Kurang Rawan : $\mu - \sigma < X < \mu + \sigma$
- Rawan : $\mu + \sigma < X < \mu + 2\sigma$
- Sangat Rawan : $X \geq \mu + 2\sigma$

Dimana : X = persentase desa./kelurahan yang mempunyai konflik maupun kejahatan terhadap kecamatan

4. Hasil pengukuran tersebut dikirim kembali ke Kabupaten/Kota untuk dilakukan penelitian ulang. Hasil penelitian Kabupaten/Kota sebagian berbeda dengan yang telah dihitung.

5. Selanjutnya setiap kecamatan diberi skor 0,1,2,3 sesuai dengan tingkat kerawannya :
- Tidak Rawan = 0
 - Kurang Rawan = 1
 - Rawan = 2
 - Sangat Rawan = 3

1.4.2 Sakerda 2003 :

1. Dihitung TPT (tingkat pengangguran terbuka) dari setiap kecamatan.
2. Setiap kecamatan diklasifikasikan tingkat kerawannya dengan kriteria sebagai berikut:

Cara Penghitungan :

- Tidak Rawan : jika TPT < 5
 - Kurang Rawan : jika TPT berada diantara 5-9.99
 - Rawan : jika TPT berada dalam selang 10 – 15
 - Sangat Rawan : jika TPT > 15
3. Demikian juga untuk pengangguran diberi skor 0, 1, 2, 3 sebagaimana kecamatan konflik atau kejahatan.

1.4.3 Penghitungan tingkat kerawanan per Kecamatan

☞ Untuk menghitung tingkat kerawanan kecamatan digunakan indeks dengan skor K, dimana

$K = (0,4 \times \text{skor konflik} + 0,4 \text{ skor kejahatan} + 0,2 \text{ skor pengangguran})$. Pemberian bobot yang berbeda untuk tingkat pengangguran adalah karena pengangguran masih merupakan potensi yang mungkin atau tidak mungkin terjadi; sedang konflik dan kejahatan telah terjadi pada tahun 2003 di beberapa desa/kelurahan dalam kecamatan.

☞ Kemudian indeks skor K untuk setiap kecamatan diatas diklasifikasikan lagi menjadi :

$\leq 0,79$	= Tidak Rawan
0,80 – 1,79	= Kurang Rawan
1,80 – 2,79	= Rawan
$\geq 2,80$	= Sangat Rawan

BAB 2.

KRIMINALITAS DAN PENGANGGURAN

2.1 Kerawanan Kriminalitas

Berbicara mengenai kriminalitas, tidak berarti hanya sampai pada deskripsi numeris berbagai bentuk pelanggaran hukum pidana atau peraturan-peraturan lain yang menerapkan sanksi yang ditentukan ataupun hanya melihat statistik kriminal resmi belaka, melainkan juga bentuk pelanggaran lain yang dianggap merugikan secara sosial dan mengguncangkan perasaan keadilan yang ada dalam masyarakat.

Dengan demikian, usaha untuk memperoleh gambaran mengenai kriminalitas yang sesungguhnya terjadi di kota-kota besar ataupun daerah lainnya, paling tidak dapat ditelusuri lewat dua sumber yakni statistik kriminal resmi dan keterangan-keterangan yang diperoleh langsung dari masyarakat (untuk pembahasan ini data diperoleh dari hasil Sensus Podes 2003 dan laporan kriminalitas dari masing-masing Polres, Polresta, Poltabes).

Kejahatan dalam arti kriminologis adalah gejala sosial yang merupakan masalah sosial. *Kejahatan dalam arti kriminologis* adalah perbuatan kriminal. Perbuatan kriminal ini lebih luas lingkungannya daripada kejahatan. Bukan hanya meliputi perbuatan pidana baik yang berbentuk pelanggaran maupun yang berbentuk kejahatan, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang oleh seorang kriminolog disebut perbuatan yang menyimpang.

Perbuatan yang menyimpang ini merugikan masyarakat dipandang dari sudut sosial etis yang sudah mapan. Dengan demikian perbuatan kriminal tidak hanya mencakup perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipidana tetapi juga oleh pandangan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan patut dipidana.

Dilihat dari *segi sosial patologik*, maka perbuatan kriminalpun merupakan gejala sosial patologik yaitu gejala dalam masyarakat dimana nampak tidak adanya persesuaian antara berbagai unsur dari keseluruhan sehingga dapat membahayakan kelanjutan dari kelompok atau merintangi pemuasan dan keinginan fundamental dari anggota kelompok, sehingga mengakibatkan pecahnya kelompok. Gejala sosial seperti pengemis, pelacuran, perjudian, pemadatan, perdagangan manusia, penghisapan, gelandangan merupakan sebagian dari gejala sosial patologik.

Diasumsikan bahwa di daerah perkotaan kriminalitas berkembang terus sejalan dengan bertambahnya penduduk, pembangunan, modernisasi dan urbanisasi. Sehingga dikatakan bahwa perkembangan kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kriminalitas. Akibatnya perkembangan keadaan ini menimbulkan keresahan masyarakat dan pemerintah di daerah tersebut.

Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas tidak dapat dihindari dan selalu ada. Sehingga wajar bila menimbulkan keresahan, karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan dan ketentraman penduduk. Sehubungan dengan keadaan ini penduduk dan pemerintah melakukan reaksi untuk memberantas masalah kriminalitas dengan berupaya mencegah sumber-sumber kerawanan yang potensial antara lain kesenjangan sosial, dan sebagainya.

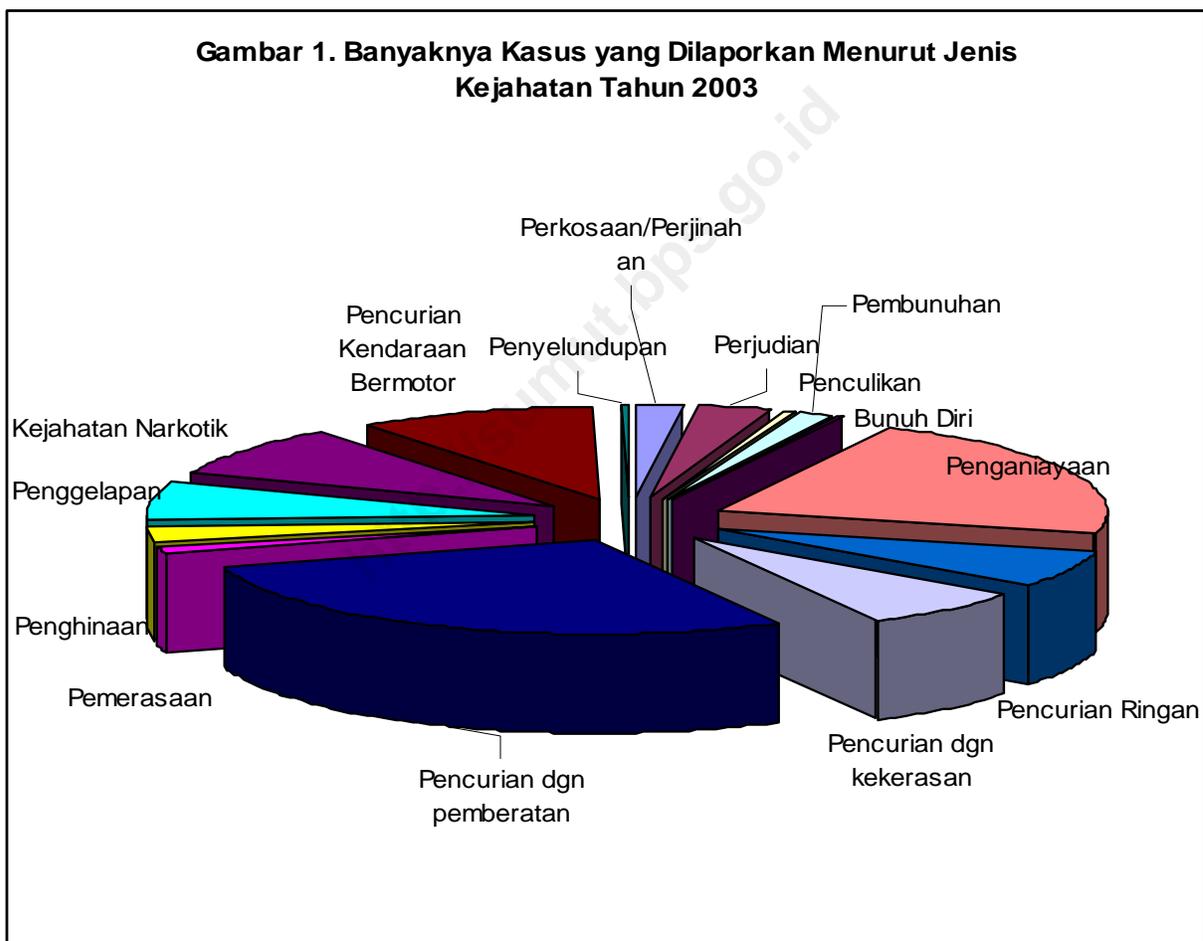
Masalah kriminalitas sebagai suatu kenyataan sosial tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah sosial ekonomi, politik dan budaya sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Selain itu perlu diperhatikan dan diperhitungkan fenomena/faktor-faktor di daerah perkotaan dan daerah pedesaan yang berkaitan satu sama lain dan yang dapat mempengaruhi terjadinya kriminalitas. Sebetulnya sebab musabab terjadinya kriminalitas di daerah perkotaan dan pedesaan pada hakikatnya tidak ada perbedaannya, karena kriminalitas merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Apalagi diperhatikan akibatnya, maka meskipun suatu kriminalitas dilakukan di kota maupun di desa, akibatnya akan dapat berpengaruh dan menimbulkan keresahan baik langsung maupun tidak langsung pada masyarakat. Misalnya: penipuan orang kota yang dilakukan terhadap orang desa, hasil penadahan orang kota yang disimpan di desa, kerja sama dalam melakukan kriminalitas antara orang kota dan orang desa, dan lain sebagainya.

Sumatera Utara sebagai daerah yang mempunyai wilayah yang sangat luas dan juga memiliki keaneka ragaman agama, budaya, suku bangsa, jenis pekerjaan dan lain-lain sangat berpotensi memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Kecenderungan kriminalitas di Sumatera Utara dan jenis kriminalitas yang paling sering terjadi di wilayah Sumatera Utara, dapat dilihat dari Statistik Kriminalitas yang dikutip dari Kepolisian Sumatera Utara tahun 2003.

Dari hasil statistik kriminal tersebut, dapat terlihat bahwa pada tahun 2003 pencurian dengan pemberatan merupakan kasus yang tertinggi dimana ada sebanyak 2.946 kasus yang dilaporkan dan 1.772 kasus yang diteruskan ke proses pengadilan. Penganiayaan merupakan jenis kejahatan tertinggi kedua yakni sebanyak 2.265 kasus dilaporkan dan 1.400 kasus diteruskan. Meskipun banyak kasus yang diproses di Kepolisian, namun hanya sebagian saja dari kasus tersebut yang memenuhi syarat untuk diteruskan ke proses pengadilan. Hal ini disebabkan karena kurangnya bukti-bukti yang menjadi kelengkapan berita acara pemeriksaan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini.



Jenis Peristiwa Kejahatan/Pelanggaran Yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan
Tahun 2003

Jenis Kejahatan	2003	
	Dilaporkan	Diteruskan
1. Perkosaan/Perjinahan	211	121
2. Perjudian	322	260
3. Penculikan	33	7
4. Pembunuhan	156	104
5. Bunuh Diri	27	7
6. Penganiayaan	2.265	1400
7. Pencurian Ringan	658	415
8. Pencurian dengan kekerasan	737	284
9. Pencurian dengan pemberatan	2.946	1.772
10. Penghinaan	126	99
11. Pemerasan	280	175
12. Penggelapan	689	319
13. Kejahatan Narkotik	922	852
14. Pencurian Kendaraan Bermotor	1.042	153
15. Penyelundupan	34	17
16. Perkelahian antar Kelompok Warga	0	0
17. Perkelahian Warga dengan aparat Keamanan	0	0
18. Perkelahian antar Suku	0	0
19. Perkelahian antar Pemuda	0	0
20. Perkelahian antar Pelajar	0	0
21. Lain-lain	2.023	1.031

Sumber : Kepolisian Sumatera Utara

Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2003, Langkat merupakan daerah tertinggi kasus pencurian dengan pemberatan yakni sebanyak 500 kasus disusul dengan Labuhan Batu sebanyak 368 kasus, Medan 345 kasus. Untuk kasus penganiayaan, Kota Medan tercatat merupakan daerah tertinggi kasusnya dilaporkan yakni sebanyak 413 kasus dilaporkan disusul Langkat 354 kasus dan Simalungun 339 kasus (dapat dilihat pada lampiran).

Agar lebih memperjelas mengenai tingkat kerawanan sosial dari segi kriminalitas maka kriminalitas tersebut dibagi menjadi kejahatan dan konflik. Termasuk dalam kelompok kejahatan adalah perkosaan/perjinaan, perjudian, penculikan, pembunuhan, bunuh diri, penganiayaan, pencurian, penghinaan, pemerasan, penggelapan, kejahatan narkotik, pencurian kendaraan bermotor, penyelundupan, dan lain-lain. Sedangkan yang dikelompokkan ke dalam konflik yakni perkelahian antar kelompok warga, perkelahian warga dengan aparat keamanan, perkelahian antar suku, perkelahian antar pemuda, perkelahian antar pelajar dan lain-lain.

2.1.1 Kejahatan

Kejahatan yang secara kualitatif maupun kuantitatif meningkat dewasa ini, pada skala global, nasional maupun regional telah diungkapkan pada data resmi maupun pernyataan para pejabat penegak hukum. Kejahatan merupakan usaha pelanggaran hukum dalam suatu situasi sosial ekonomi yang sulit yang bersumber pada tatanan sosial.

Adalah fakta bahwa kejahatan tertentu dapat dipandang sebagai pernyataan kekurangan kebutuhan jasmani maupun rohani yang disebabkan dan dipertahankan oleh struktur poleksos masyarakat yang bersangkutan. Pencurian dapat dilakukan karena kebutuhan ekonomi yang tidak adil. Kejahatan atas harta benda dapat disebabkan oleh keserakahan yang dirangsang oleh alat-alat produktif dan sarana reklame yang kapitalis. Kejahatan yang menggunakan kekerasan dapat merupakan suatu penyaluran harga diri yang difrustasikan dalam suatu masyarakat yang mempertahankan keterbelakangan sosial yang mustahil diatasi oleh individu, tetapi sekali-kali mempropagandakan kesamaan harkat dan martabat manusia (Paul Moedikdo, *“Criminal and Politicization”*).

Penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan tertentu terutama kejahatan individual harus dilihat dan dijelaskan dalam konteks ketidakadilan struktural yang ada dalam masyarakat. Kejahatan yang ada adalah kejahatan dalam masyarakat dan merupakan bagian dari proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang sangat mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan seringkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat.

2.1.2 Konflik

Kita semua sudah pernah melihat orang atau kelompok orang terlibat dalam konflik. Konflik, perselisihan, perpecahan, pertentangan merupakan pengalaman hidup yang cukup mendasar karena meskipun tidak harus tetapi mungkin bahkan amat mungkin terjadi. Konflik terjadi manakala dalam hubungan antara dua orang atau dua kelompok, perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan lainnya, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Secara teoritis, konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah terjadi disetiap interaksi sosial dalam tatanan pergaulan keseharian masyarakat (Johnson, 1989 : 269-274). Konflik dapat berperan sebagai pemicu proses menuju keseimbangan sosial. Bahkan bila konflik dapat dikelola dengan baik sampai batas tertentu, maka dapat juga dipakai sebagai alat perekat kehidupan masyarakat.

Namun konflik sosial menjadi tidak lumrah dan dapat menjadi sumber kerawanan sosial apabila disertai dengan tindakan anarkis dan kebrutalan. Konflik sosial semakin terasa sangat tidak patut karena sudah menuju ke bentuk kekerasan sosial hampir di seluruh lapisan masyarakat disertai dengan terancamnya keutuhan hidup berbangsa.

Jenis-jenis konflik sangat beragam, namun yang dibahas disini hanya konflik sosial horizontal yakni konflik yang terjadi karena adanya konflik antar etnis, suku, golongan (agama), atau antar kelompok masyarakat.

Data konflik yang dibahas disini diambil dari statistik kriminal yang dikutip dari Kepolisian Sumatera Utara tahun 2003 yang mencakup : perkelahian antar kelompok warga, perkelahian warga dengan aparat keamanan, perkelahian antar suku, perkelahian antar pemuda, perkelahian antar pelajar dan lain-lain.

Selama tahun 2003, tingkat konflik di Sumatera Utara yang dilaporkan ke kepolisian tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara pada umumnya aman dari potensi konflik.

2.2 Kerawanan Pengangguran

Pengangguran merupakan issue utama di suatu daerah atau negara berkaitan dengan pemberdayaan dan pemanfaatan tenaga kerja. Berbagai kebijakan ketenaga kerjaan diarahkan untuk menekan jumlah pengangguran dengan memutar lebih kencang lagi roda perekonomian. Jumlah pengangguran yang tidak terkendali akan berdampak pada kehidupan sosial dan kondisi politik suatu negara dimana jumlah pengangguran yang terlalu tinggi akan membuat kondisi

daerah tersebut menjadi rawan. Untuk penanganan pengangguran agar lebih terarah dan terkendali, diperlukan informasi yang lengkap berkaitan dengan jumlah pengangguran dan kondisi kerawanan menurut tingkat pengangguran. Ketidak seimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, cepat atau lambat akan menimbulkan berbagai masalah sosial dimana kriminalitas merupakan salah satu wujudnya.

Untuk melihat lebih jelas tingkat kerawanan sosial dari segi pengangguran di Sumatera Utara yang disajikan sampai tingkat kecamatan dapat dilihat pada lampiran publikasi ini

<http://sumut.bps.go.id>

BAB 3.

KERAWANAN SOSIAL DAN KRIMINALITAS MENURUT KECAMATAN

3.1 Analisa Kerawanan Per Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil pengolahan dari data hasil Sensus Podes 2003 dan Survei Angkatan Daerah (Sakerda) 2003 seperti yang telah dijelaskan cara pengolahannya pada Bab. I diatas, maka didapatkan hasil seperti lampiran 1. Analisis hasil yang lebih jelas, dilakukan per Kabupaten/Kota yang dirinci menurut kecamatan untuk 25 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

1. KABUPATEN NIAS

Setelah pecah dengan Kabupaten Nias Selatan maka Kabupaten Nias hanya terdiri dari 14 kecamatan dimana tidak ada satupun dari kecamatan tersebut yang dapat dikategorikan sebagai daerah rawan sosial dan kriminal. Meskipun begitu, ada 2 kecamatan yakni Kecamatan Gido dan Kecamatan Lolofitu Moi merupakan kecamatan yang dapat digolongkan rawan terhadap konflik dan kejahatan. Untuk kecamatan Sirombu, Mandrehe dan Hiliduho merupakan kecamatan yang rawan konflik. Setelah diteliti lebih lanjut dari sisi keaneka ragaman suku dan dan agama, ternyata ke-2 kecamatan tersebut dapat dikatakan homogen dimana hampir sekitar 80 persen menganut agama Kristen Protestan dan suku yang terbanyak adalah suku Nias yakni sebanyak 90 persen. Namun hal tersebut tidak membuat potensi konflik di daerah ini menjadi kecil/rendah. **Secara umum, Kabupaten Nias merupakan daerah yang aman.**

2. KABUPATEN MANDALING NATAL

Secara keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal berada dalam kategori tidak rawan secara sosial dan kriminal. Namun bila dirinci menurut jenis kerawanan maka ada beberapa kecamatan yang dikategorikan rawan konflik ada 2 kecamatan yakni Kecamatan Muara Batang Gadis dan Bukit Malintang dan untuk yang rawan kejahatan ada 4 kecamatan yakni Kecamatan Ulu Pungkut, Tambangan, Muara Sipongi dan Panyabungan Timur sedangkan untuk rawan pengangguran tidak ada satupun kecamatan yang dapat disebut rawan karena rendahnya tingkat pengangguran di daerah ini. Kalau dilihat faktor-faktor yang dapat menyebabkan konflik dari sisi keanekaragaman agama dan suku, dapat dikatakan

Kecamatan Muara Batang Gadis dan Bulit Malintang termasuk kecamatan yang homogen dari sudut agama dimana sekitar 99,98 persen di Kecamatan Muara Batang Gadis dan 92,68 persen di Kecamatan Bukit Malintang menganut agama Islam. Dari segi suku di Kecamatan Muara Batang Gadis ada sekitar 63,97 persen suku Melayu dan sekitar 34,62 persen suku Mandailing dan sisanya suku Jawa, Nias dan Tapanuli, sehingga suku bisa dikatakan dapat mempengaruhi konflik disana karena keanekaragaman sukunya, begitu juga untuk Kecamatan Bukit Malintang hampir 88 persen penduduknya adalah suku Mandailing, suku Tapanuli sekitar 8 persen dan sisanya adalah suku Jawa dan Nias.

3. **KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ada satupun kecamatan yang dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang rawan sosial maupun kriminalitas. Sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten ini digolongkan sebagai daerah yang kurang rawan sosial. Namun jika dirinci menurut faktor-faktor yang dikategorikan untuk jenis kerawanan maka ada beberapa kecamatan yang dapat diklasifikasikan rawan yakni kecamatan Siais merupakan daerah rawan konflik, kecamatan Padang Sidempuan Timur daerah rawan kejahatan, namun tidak ada satupun kecamatan yang dapat digolongkan rawan pengangguran. Keaneka ragaman suku dan agama merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan konflik di Kecamatan Siais dimana ada sekitar 41 persen suku Tapanuli, 35 persen suku Mandailing, 10 persen suku Nias dan 9 persen suku Jawa sementara untuk agama yakni sekitar 77,30 persen penduduk di Kecamatan ini memeluk agama Islam, sisanya sekitar 20,43 persen beragama Protestan dan 2,3 persen beragama Katolik.

4. **KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, ada 2 kecamatan yakni kecamatan Lumut dan Badiri yang diklasifikasikan sebagai daerah rawan sosial dan kriminalitas. **Namun secara keseluruhan Kabupaten ini dapat digolongkan sebagai daerah yang kurang rawan sosial dan kriminalitas.** Kecamatan tersebut diatas juga digolongkan rawan menurut tingkat konflik dan kejahatan. Selain 2 kecamatan tersebut, kecamatan Sibabangun merupakan daerah yang rawan kejahatan dan kecamatan Tukka merupakan daerah rawan pengangguran. Kecamatan Lumut dan Badiri merupakan daerah yang menyimpan potensi konflik karena daerah ini mempunyai keaneka ragaman suku dan agama dimana sekitar 54 persen penduduk adalah

suku Tapanuli, sisanya adalah suku Pakpak sekitar 18 persen, Nias sekitar 15 persen dan suku-suku lainnya. Selain itu hampir sekitar 55 persen penduduk memeluk agama Islam, yang memeluk agama Kristen sekitar 37 persen dan Katolik 8 persen.

5. **KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Secara umum Kabupaten ini dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang tidak rawan sosial dan kriminalitas karena sebagian besar kecamatannya dapat diklasifikasikan kurang rawan secara sosial dan kriminalitas. Kalau dilihat menurut jenis kerawanan maka tidak ada satupun kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara yang dapat diklasifikasikan rawan baik itu rawan menurut konflik, kejahatan maupun pengangguran.

6. **KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

Kabupaten Toba Samosir terdiri dari 11 kecamatan dimana tidak ada satupun kecamatan yang dapat diklasifikasikan rawan menurut konflik, sementara itu ada 3 kecamatan yang dianggap rawan menurut kejahatan yakni Kecamatan Balige, Borbor dan Sigumpar sedangkan untuk pengangguran tidak ada satu kecamatan pun yang diklasifikasikan rawan sehingga secara keseluruhan **Kabupaten Toba Samosir dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang tidak rawan sosial dan kriminalitas.**

7. **KABUPATEN LABUHAN BATU**

Dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu yang dapat diklasifikasikan rawan menurut kejahatan yakni Kecamatan Sungai Kanan, Silangkitang, Bilah Hulu, Kampung Rakyat, Na IX-X, Marbau, Panai Hulu, Kualuh Hilir, Kualuh Selatan, Kualuh Hulu dan Rantau Selatan sedangkan untuk kecamatan yang rawan terhadap pengangguran adalah kecamatan Marbau dan Kualuh Selatan. Meskipun banyak kecamatan yang rawan terhadap kejahatan namun tidak ada satupun kecamatan yang dapat dikategorikan rawan terhadap konflik. Jadi secara keseluruhan **Kabupaten Labuhan Batu dapat digolongkan sebagai daerah yang kurang rawan sosial dan kriminalitas.**

8. **KABUPATEN ASAHAN**

Ada 3 kecamatan di Kabupaten Asahan yang dapat digolongkan sebagai daerah yang rawan sosial yakni Kecamatan Air Batu, Buntu Pane dan Tanjung Tiram. Tingginya tingkat kerawanan konflik di Kecamatan Air Batu dan Tanjung Tiram sehingga dapat diklasifikasikan

sangat rawan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kecamatan ini dapat diklasifikasikan sangat rawan. Selain itu, kecamatan Air Batu juga dapat dikatakan rawan terhadap kejahatan namun tidak rawan terhadap pengangguran. Untuk kecamatan Buntu Pane, selain rawan terhadap konflik daerah ini juga rawan terhadap kejahatan dan kurang rawan terhadap pengangguran. Dipandang dari keaneka ragaman agama dan suku dapat terlihat bahwa mayoritas penduduk di ke-3 kecamatan tersebut adalah pemeluk agama Islam dimana sekitar 95 persen di kecamatan Air Batu, 93 persen di kecamatan Buntu Pane dan sekitar 90 persen di kecamatan Tinjang Tiram. Sedangkan untuk suku, di Kecamatan Air Batu yang bersuku paling banyak yakni suku Jawa sekitar 75 persen dan suku Tapanuli sekitar 17 persen, di kecamatan Buntu Pane ada sekitar 73 persen bersuku Jawa dan 22 persen suku Tapanuli, dan di kecamatan Tanjung Tiram sekitar 52 persen bersuku Melayu, suku Jawa sekitar 30 persen dan suku Tapanuli sekitar 13 persen. Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keaneka ragaman suku yang ada di ke-3 kecamatan tersebut menyimpan potensi yang dapat menyebabkan konflik. Meskipun ada 3 kecamatan di Kabupaten Asahan yang masuk dalam kategori rawan sosial namun **secara umum daerah ini masih bisa diklasifikasikan kurang rawan secara sosial dan kriminalitas.**

9. KABUPATEN SIMALUNGUN

Walaupun Kabupaten Simalungun merupakan daerah besar yang terdiri dari 30 kecamatan, namun **dapat dikatakan daerah ini merupakan daerah yang kurang rawan secara sosial dan kriminalitas** karena hanya ada beberapa daerah yang dapat dikategorikan rawan menurut konflik dan kejahatan yakni kecamatan Dolok Silau merupakan daerah rawan konflik, sedangkan kecamatan yang rawan kejahatan yakni Tanah Jawa, Jorlang Hataran, Raya, Dolok Batunanggar dan Bosar Maligas. Untuk tingkat pengangguran daerah ini masih kurang rawan, hal ini karena sebagian besar wilayahnya merupakan areal perkebunan dan pertanian tanaman pangan.

10. KABUPATEN DAIRI

Setelah sebagian wilayahnya menjadi Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Dairi terdiri dari 11 Kecamatan dimana tidak ada daerah yang dapat dikategorikan rawan konflik ataupun rawan pengangguran, namun ada 2 kecamatan yang rawan kejahatan yakni kecamatan Tiga Lingga dan Tanah Pinem sehingga **Kabupaten ini dapat dikategorikan daerah yang kurang rawan secara sosial dan kriminalitas.**

11. KABUPATEN KARO

Secara umum Kabupaten Karo dapat digolongkan sebagai daerah yang kurang rawan secara sosial dan kriminalitas karena dari 13 kecamatan yang terdapat di Kabupaten ini hanya ada 1 kecamatan yang dapat diklasifikasikan rawan menurut kejahatan yakni kecamatan Berastagi. Selebihnya tidak ada yang dapat diklasifikasikan rawan baik itu menurut konflik, kejahatan maupun pengangguran. Ternyata keanekaragaman suku dan agama di Kabupaten ini dimana ada sekitar 56 persen penduduknya memeluk agama Protestan, 25 persen beragama Islam, 17 persen beragama Katolik dan sekitar 75 persen suku Karo, 11 persen suku Tapanuli, namun hal ini tidak banyak mempengaruhi potensi konflik di daerah ini. Letak Berastagi sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Propinsi Sumatera Utara, membaurnya beragam budaya/peradaban baik modern maupun tradisional menimbulkan benturan yang mempengaruhi pola hidup masyarakat.

12. KABUPATEN DELI SERDANG

Setelah mengalami pemekaran wilayah menjadi 2 Kabupaten yakni Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai, jumlah kecamatan di Kabupaten Deli Serdang hanya 22 kecamatan dimana dari sejumlah kecamatan tersebut hanya ada 1 kecamatan yang dikategorikan rawan sosial dan kriminalitas yakni kecamatan Labuhan Deli. Kalau dicermati setelah dirinci menurut jenis kerawanan maka kecamatan ini dapat dikategorikan sangat rawan terhadap konflik, rawan terhadap kejahatan dan juga rawan terhadap pengangguran. Kecamatan Sunggal merupakan daerah yang juga rawan terhadap konflik. Sementara itu kecamatan yang juga rawan terhadap kejahatan yakni kecamatan Patumbak, Hamparan Perak dan Batang Kuis. Kalau ditinjau kerawanan menurut pengangguran maka pada umumnya Kabupaten ini rawan karena sebagian besar kecamatannya rawan pengangguran yakni kecamatan Biru-biru, Galang, Tanjung Morawa, Patumbak, Deli Tua, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Beringin dan Lubuk Pakam. Namun **secara keseluruhan, Kabupaten Deli Serdang termasuk kategori kurang rawan dari kerawanan sosial dan kriminalitas.**

13. **KABUPATEN LANGKAT**

Dari 20 kecamatan di Kabupaten Langkat ada sebanyak 4 kecamatan yang dapat dikategorikan rawan sosial dan kriminalitas yakni kecamatan Sei Bingai, Sawit Seberang, Tanjung Pura dan Babalan. Kecamatan Sei Bingai dan Babalan merupakan daerah yang sangat rawan terhadap konflik. Ditinjau dari agama dan suku yang ada di 2 kecamatan tersebut, yakni di kecamatan Sei Bingai ada sebanyak 58 persen pemeluk agama Islam dan 36 persen pemeluk agama Protestan, penduduk yang bersuku Karo sebesar 65 persen dan 29 persen bersuku Jawa. Sementara itu di kecamatan Babalan penduduknya sebagian besar yakni 86 persen beragama Islam, 11 persen beragama Protestan, dan penduduk yang bersuku Jawa 39 persen, suku Melayu sekitar 14 persen, suku Tapanuli 13 persen dan sisanya suku lainnya. Keaneka ragaman suku dan agama di 2 kecamatan ini juga dapat menyebabkan daerah ini menjadi sangat rawan terhadap konflik. Selain konflik, ternyata ada beberapa kecamatan yang sangat rawan terhadap pengangguran yakni kecamatan Salapian, Sawit Seberang, Padang Tualang, Hinai, Babalan, Sei Lapan dan Pangkalan Susu. Tingginya angka pengangguran di kecamatan tersebut menyebabkan kecamatan tersebut menjadi sangat rawan pengangguran. Walaupun demikian, **Kabupaten Langkat masih bisa dikategorikan kurang rawan sosial dan kriminalitas.**

14. **KABUPATEN NIAS SELATAN**

Secara keseluruhan **Kabupaten Nias Selatan** yang merupakan pecahan dari Kabupaten Nias dan memiliki 8 kecamatan **dapat dikategorikan kurang rawan sosial dan kriminalitas** walaupun ada 2 kecamatan yang dapat diklasifikasikan sangat rawan yakni kecamatan Teluk Dalam dan Amandraya dimana selain rawan terhadap kejahatan, daerah tersebut juga sangat rawan terhadap konflik sehingga kedua daerah tersebut menjadi rawan sosial dan kriminalitas. Gomo ternyata hanya rawan terhadap kejahatan sedang konflik maupun pengangguran masih dianggap baik. Walaupun mayoritas penduduk di 2 kecamatan tersebut adalah suku Nias namun hal ini tidak mengurangi konflik yang sering terjadi di daerah ini. Perlu ada terobosan untuk merubah cara pandang dan bertindak masyarakat di 3 (tiga) kecamatan tersebut agar mampu menerima perubahan yang telah maupun yang akan terjadi.

15. **KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Kabupaten yang merupakan pecahan dari Kabupaten Tapanuli Utara ini memiliki 10 kecamatan dimana salah satu kecamatan tersebut dapat dikategorikan sebagai daerah yang rawan sosial dan kriminalitas yakni kecamatan Dolok Sanggul. Tingginya tingkat kerawanan konflik

sehingga dapat disebut sangat rawan terhadap konflik dan juga rawan terhadap kejahatan merupakan faktor penyebab kerawanan sosial di daerah ini. Kecamatan Paranginan juga termasuk kecamatan yang sangat rawan terhadap konflik tetapi karena daerah ini kurang rawan terhadap kejahatan dan tidak rawan terhadap pengangguran sehingga kecamatan ini tidak dapat disebut daerah yang rawan sosial dan kriminalitas. Ternyata walaupun penduduk di 2 kecamatan ini homogen dimana 98 persen penduduk di kecamatan Dolok Sanggul dan 99 persen penduduk di kecamatan Paranginan adalah suku Tapanuli, 91 persen penduduk di kecamatan Dolok Sanggul dan 98 persen penduduk di kecamatan Paranginan adalah suku Tapanuli, namun hal ini tidak mengurangi potensi konflik di daerah ini. **Secara umum Kabupaten ini dapat diklasifikasikan kurang rawan sosial dan kriminalitas.**

16. KABUPATEN PAKPAK BARAT

Secara umum daerah yang merupakan pecahan dari Kabupaten Dairi ini dapat dikategorikan kurang rawan sosial dan kriminalitas karena setelah dirinci menurut jenis kerawanan, tidak ada satupun kecamatan yang dapat dikategorikan rawan baik itu menurut konflik, kejahatan maupun pengangguran. Agama dan suku yang bervariasi tidak membuat daerah ini menjadi rawan terhadap konflik, dimana ada sekitar 80 persen penduduk adalah suku Tapanuli dan 57 persen beragama Kristen dan 36 persen bergama Islam dan sisanya agama lain.

17. KABUPATEN SAMOSIR

Kabupaten Samosir yang merupakan pecahan dari Kabupaten Toba Samosir memiliki 9 kecamatan dimana hanya 1 hanya kecamatan yang dapat diklasifikasikan rawan menurut kejahatan yakni kecamatan Ronggur Nihuta sehingga secara umum **Kabupaten ini dapat diklasifikasikan tidak rawan sosial dan kriminalitas.**

18. KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Setelah pecah dari Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 11 kecamatan dimana tidak ada satupun kecamatan yang dapat dikategorikan sebagai daerah yang rawan sosial dan kriminalitas sehingga Kabupaten ini dapat dikategorikan kurang rawan sosial dan kriminalitas. Namun jika dirinci menurut jenis kerawanan ternyata ada beberapa kecamatan yang dapat dikategorikan rawan yakni rawan konflik adalah kecamatan Tanjung Beringin, rawan kejahatan yakni kecamatan Teluk Mengkudu, Sei Rampah dan Pantai Cermin sedangkan untuk rawan pengangguran adalah kecamatan Kotarih, Dolok Masihul, Sipispis, Dolok Merawan, Bandar Khalipah, Perbaungan dan Pantai Cermin.

19. KOTA SIBOLGA

Walaupun Kota Sibolga merupakan daerah yang kecil hanya terdiri dari 4 kecamatan, tetapi ada 2 kecamatan yang rawan sosial dan kriminalitas yakni kecamatan Sibolga Kota dan Sibolga Sambas. Faktor yang menyebabkan kedua kecamatan tersebut rawan sosial adalah karena selain rawan terhadap kejahatan, kecamatan Sibolga Kota dan Sibolga Sambas juga rawan terhadap konflik. Suku dan agama yang bervariasi di dua kecamatan tersebut ternyata dapat mempengaruhi potensi konflik di daerah tersebut dimana di kecamatan ada sebanyak 42 persen penduduk yang bersuku Tapanuli, Cina sekitar 19 persen, Minang sekitar 16 persen dan penduduk yang memeluk agama Islam sekitar 59 persen, agama Kristen sekitar 19 persen, agama Budha sekitar 14 persen. Sementara itu di kecamatan Sambas yang merupakan pecahan dari kecamatan Sibolga Selatan, sebagian penduduknya adalah suku Tapanuli yakni sebesar 51 persen, suku Minang sebesar 12 persen, dan suku Nias sebesar 10 persen; kemudian penduduk yang memeluk agama Islam sekitar 71 persen, agama Kristen sekitar 24 persen. Jadi secara umum **Kota Sibolga dapat dikategorikan rawan sosial dan kriminalitas.**

20. KOTA TANJUNG BALAI

Kota Tanjung Balai yang terdiri dari 5 kecamatan tidak memiliki kecamatan yang dapat digolongkan rawan sosial dan kriminalitas sehingga **dapat dikategorikan kurang rawan sosial dan kriminalitas**, tetapi ada 1 kecamatan yang dapat digolongkan sangat rawan terhadap pengangguran yakni kecamatan Tanjung Balai Selatan. Kecamatan Datuk Bandar, Tanjung Balai Utara dan Sei Tualang Raso merupakan daerah yang rawan terhadap pengangguran. Sedangkan untuk kecamatan yang rawan terhadap kejahatan adalah kecamatan Datuk Bandar, Tanjung Balai Utara dan S. Tualang Raso. Untuk kecamatan yang rawan terhadap konflik hanya 1 kecamatan yakni kecamatan S. Tualang Raso. Salah satu faktor yang mungkin menyebabkan kecamatan ini rawan terhadap konflik yakni jumlah suku yang bervariasi dimana suku Tapanuli sekitar 59 persen, Melayu sekitar 18 persen, Jawa sekitar 11 persen, Minang sekitar 2 persen, Cina 2 persen dan Aceh sekitar 1 persen.

21. KOTA PEMATANG SIANTAR

Seperti halnya Kota Tanjung Balai, **Kota Pematang Siantar juga dapat dikategorikan sebagai daerah yang kurang rawan sosial dan kriminalitas.** Secara umum Kota Pematang Siantar dapat dikatakan rawan terhadap pengangguran karena seluruh kecamatannya rawan

terhadap pengangguran malah ada kecamatan yang sangat rawan yakni kecamatan Siantar Marihat. Meskipun kecamatan Siantar Marihat merupakan daerah yang sangat rawan terhadap pengangguran, tetapi karena daerah ini kurang rawan terhadap konflik dan kejahatan maka daerah ini dapat dikategorikan kurang rawan sosial dan kriminalitas.

22. KOTA TEBING TINGGI

Untuk Kota Tebing Tinggi, pada umumnya daerah ini kurang rawan terhadap konflik dan pengangguran tetapi rawan terhadap kejahatan dimana ketiga kecamatan yang ada di daerah ini rawan terhadap kejahatan. Namun karena hanya faktor kejahatan saja yang dapat disebut rawan, maka **daerah ini dapat dikategorikan sebagai daerah kurang rawan sosial dan kriminalitas.**

23. KOTA MEDAN

Hampir separuh dari sejumlah 21 kecamatan yang ada di Kota Medan dapat dikategorikan sebagai daerah yang rawan sosial dan kriminalitas. Kecamatan tersebut adalah kecamatan Medan Johor, Medan Denai, Medan Kota, Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Petisah, Medan Timur, Medan Tembung, Medan Deli dan Medan Kota Belawan. Kota Medan juga dapat dikatakan sangat rawan terhadap pengangguran karena hampir sebagian besar kecamatannya sangat rawan terhadap pengangguran (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel). Selain sangat rawan terhadap pengangguran, ada beberapa kecamatan yang juga rawan terhadap konflik yakni: kecamatan Medan Sunggal, Medan Tembung dan Medan Kota Belawan. Selain itu ke-3 kecamatan ini juga rawan terhadap kejahatan sehingga kecamatan-kecamatan ini masuk dalam kategori rawan sosial dan kriminalitas. Dilihat dari keanekaragaman suku dan agama, terlihat banyaknya suku yang ada di Kota Medan yakni sekitar 33 persen penduduk adalah suku Minang, sekitar 19 persen suku Tapanuli, 11 persen suku Cina, dan sekitar 7 persen suku Melayu serta sekitar 68 persen penduduk memeluk agama Islam, 18 persen agama Protestan, 10 persen agama Budha dan sekitar 2 persen agama Katolik. Hal ini juga dapat mempengaruhi potensi konflik terlihat dengan banyaknya kecamatan yang rawan terhadap konflik. Ada beberapa kecamatan yang rawan terhadap kejahatan yakni kecamatan Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Petisah, Medan Timur, Medan Tembung, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Kota Belawan. Melihat hal diatas, kiranya **Kota Medan dapat dikatakan cenderung rawan sosial dan kriminalitas.**

24. KOTA BINJAI

Dari 5 kecamatan di Kota Binjai, ada 1 kecamatan yang dapat disebut rawan secara sosial dan kriminalitas yakni kecamatan Binjai Kota dimana ada 2 faktor yang menyebabkannya yaitu kecamatan ini sangat rawan terhadap pengangguran dan rawan terhadap kejahatan. Selain kecamatan Binjai Kota, 4 kecamatan lainnya juga rawan terhadap pengangguran. Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah daerah setempat untuk mengurangi angka pengangguran di daerah ini. Kota Binjai juga rawan terhadap kejahatan dimana hanya ada 1 kecamatan yang kurang rawan yakni kecamatan Binjai Kota. Ternyata, walaupun jumlah suku dan agama di Kota Binjai bervariasi (dimana penduduk yang bersuku Jawa sekitar 52 persen, suku Mandailing sekitar 9 persen, suku Tapanuli sekitar 7 persen, suku Minang sekitar 7 persen dan sisanya suku lainnya, penduduk yang memeluk agama Islam sekitar 85 persen, agama Protestan sekitar 7 persen, agama Budha sekitar 6 persen dan agama Katolik sekitar 2 persen), namun hal ini tidak membuat daerah ini menjadi rawan terhadap konflik sehingga **Kota Binjai dapat dikategorikan kurang rawan sosial dan kriminalitas.**

25. KOTA PADANG SIDIMPUAN

Sama halnya dengan Kota Binjai, Kota Padang Sidempuan yang merupakan pecahan dari Kabupaten Tapanuli Selatan ini memiliki 1 kecamatan yang dapat dikategorikan rawan sosial dan kriminalitas yakni kecamatan Padang Sidempuan Selatan dimana daerah ini sangat rawan terhadap konflik dan rawan terhadap kejahatan. Selain kecamatan Padang Sidempuan Selatan, kecamatan Padang Sidempuan Utara juga sangat rawan terhadap konflik

Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara dan Padang Sidempuan juga merupakan daerah yang rawan terhadap kejahatan. **Secara keseluruhan Kota Padang Sidempuan dapat dikategorikan kurang rawan sosial dan kriminalitas.**

3.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab kerawanan sosial dimana dengan semakin banyaknya jumlah penduduk miskin dapat meningkatkan tindak kriminal di daerah tersebut. Kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan non makanan yang minimal harus dipenuhi.

Kesenjangan sosial merupakan salah satu faktor penyebab munculnya kemiskinan struktural. Alfian, Melly G. Tan dan Selo Sumarjan (1980:5) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi, kekurangan fasilitas untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan peluang kerja dan kekurangan perlindungan hukum.

Karena keterbatasan data, maka data kemiskinan yang dapat ditampilkan pada publikasi ini hanya sampai wilayah Kabupaten/Kota saja.

Dari tabel 1. dibawah dapat dilihat perkembangan penduduk miskin di Sumatera Utara dari tahun 1999-2004. Secara umum baik jumlah maupun persentase penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana pada tahun 1999 persentase penduduk miskin sebesar 16,74 persen, kemudian turun menjadi 15,84 persen tahun 2002, 15,89 persen tahun 2003 dan turun lagi menjadi 14,93 persen pada tahun 2004.

Kabupaten Nias Selatan merupakan daerah tertinggi penduduk miskinnya pada tahun 2004 yakni sebesar 32,15 persen, disusul Kabupaten induknya yakni Kabupaten Nias sebesar 31,58 persen kemudian Kabupaten Tapanuli Tengah yakni sebesar 31,47 persen. Sedangkan daerah yang paling rendah persentase penduduk miskinnya adalah Kota Binjai yakni sebesar 6,40 persen jauh dibawah rata-rata Sumatera Utara yakni 14,93 persen. Kemudian disusul Kota Medan sebesar 7,13 persen dan Kabupaten Deli Serdang sebesar 7,91 persen.

Tabel 1.
**JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT KABUPATEN/
KOTA TAHUN 1999-2004**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)				Persentase			
	1999	2002	2003	2004	1999	2002	2003	2004
1. Nias	393.6	224.0	226.1	135.8	56.99	31.42	32.41	31.58
2. Mandailing Natal	*	88.1	85.3	80.2	*	23.77	23.08	21.31
3. Tapanuli Selatan	140.0	165.9	173.4	138.3	12.40	21.87	22.67	22.08
4. Tapanuli Tengah	54.5	74.7	85.8	87.1	21.06	29.89	31.50	31.47
5. Tapanuli Utara	101.9	85.6	87.0	48.9	14.00	20.89	21.33	19.16
6. Toba Samosir	*	74.1	62.6	58.4	*	24.03	21.92	20.37
7. Labuhan Batu	150.0	130.4	143.7	131.3	16.49	15.06	15.78	14.16
8. Asahan	157.4	158.4	144.7	129.6	17.47	15.66	14.61	12.91
9. Simalungun	180.9	163.1	153.5	146.3	20.76	18.87	18.99	17.94
10. Dairi	48.4	72.9	66.3	54.6	16.06	24.66	22.89	21.16
11. Karo	14.4	67.1	62.5	62.1	2.02	23.20	20.35	20.00
12. Deli Serdang	201.6	203.8	170.6	165.5	10.46	9.98	8.30	7.91
13. Langkat	174.2	194.4	199.5	189.2	19.54	20.60	21.21	19.89
14. Nias Selatan	*	*	*	90.2	*	*	*	32.15
15. Humbang Hasundutan	*	*	*	30.7	*	*	*	20.11
16. Pakpak Barat	*	*	*	7.7	*	*	*	22.62
17. Sibolga	10.8	8.5	8.0	7.8	13.30	10.10	9.34	9.01
18. Tanjung Balai	7.8	20.0	19.1	18.6	6.66	14.62	13.19	12.53
19. Pematang Siantar	49.9	30.3	27.2	26.2	20.91	12.28	12.14	11.55
20. Tebing Tinggi	17.8	15.1	14.6	13.5	12.89	11.94	11.01	10.10
21. Medan	240.0	93.2	143.5	142.6	11.81	4.80	7.25	7.13
22. Binjai	19.4	14.3	16.0	14.7	8.75	6.14	7.05	6.40
23. Padang Sidempuan	*	*	*	20.6	*	*	*	13.65
Sumatera Utara	1972.7	1883.9	1889.4	1800.1	16.74	15.84	15.89	14.93

*) masih bergabung dengan Kabupaten induk

Sumber : Badan Pusat Statistik Prop. Sumatera Utara

BAB 4.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai tingkat kerawanan sosial di Provinsi Sumatera Utara yakni :

1. Secara umum Provinsi Sumatera Utara dapat dikategorikan sebagai daerah yang aman baik dari kejahatan maupun konflik, namun beberapa kecamatan yang ada masih mempunyai potensi menimbulkan konflik dan kejahatan. Jika daerah-daerah tersebut potensi konflik dan kejahtannya tidak dapat dikurangi dan dicegah sumber masalahnya maka daerah ini masih ada kecenderungan untuk menjadi rawan sosial dan kriminalitas.
2. Keanekaragaman suku dan agama tidak selamanya menyebabkan terjadinya konflik di suatu daerah, karena ada beberapa daerah/kecamatan yang jumlah sukunya bervariasi namun cenderung tidak rawan konflik.
3. Meskipun Provinsi Sumatera Utara belum dapat dikategorikan daerah yang rawan sosial tetapi beberapa sumber-sumber kerawanan seperti adanya perkelahian di beberapa desa/kelurahan, kejahatan dalam bentuk penganiayaan dan pencurian dengan kekerasan maupun pengangguran yang menunjukkan peningkatan. Peningkatan partisipasi dari masyarakat untuk menjaga keamanan daerahnya dan pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat dan peran tokoh agama/masyarakat diharapkan akan mampu mengurangi terjadinya kerawanan sosial dan kriminalitas di masyarakat.

LAMPIRAN

<http://sum.hk.id>

KABUPATEN NIAS

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	IDANO GAWO	1	1	0	2	0.8
2	BAWOLATO	1	1	0	2	0.8
3	GIDO	2	2	0	4	1.6
4	LOLOFITU MOI	2	2	0	4	1.6
5	SIROMBO	1	2	0	3	1.2
6	MANDREHE	1	2	0	3	1.2
7	HILIDUHO	1	2	0	3	1.2
8	GUNUNG SITOLI	1	0	0	1	0.4
9	TUHEMBERUA	1	1	0	2	0.8
10	LOTU	1	1	0	2	0.8
11	ALASA	1	1	0	2	0.8
12	NOMOHALU ESIWA	1	1	0	2	0.8
13	LAHEWA	1	1	0	2	0.8
14	AFULU	1	1	0	2	0.8

KABUPATEN MANDAILING NATAL

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	BATAHAN	1	1	1	3	1.0
2	BATANG NATAL	1	1	1	3	1.0
3	LINGGA BAYU	1	1	0	2	0.8
4	KOTANOPAN	1	0	1	2	0.6
5	ULU PUNGKUT	1	2	0	3	1.2
6	TAMBANGAN	1	2	0	3	1.2
7	LEMBAH SORIK MERAPI	1	0	0	1	0.4
8	MUARA SIPONGI	1	2	0	3	1.2
9	PANYABUNGAN	1	1	1	3	1.0
10	PANYABUNGAN SELATAN	1	1	0	2	0.8
11	PANYABUNGAN BARAT	1	0	0	1	0.4
12	PANYABUNGAN UTARA	1	1	1	3	1.0
13	PANYABUNGAN TIMUR	1	2	1	4	1.4
14	NATAL	1	1	0	2	0.8
15	MUARA BATANG GADIS	2	0	0	2	0.8
16	SIABU	1	1	1	3	1.0
17	BUKIT MALINTANG	2	1	1	4	1.4

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	BATANG ANGKOLA	1	1	1	3	1.0
2	SAYUR MATINGGI	1	1	0	2	0.8
3	SOSOPAN	1	1	0	2	0.8
4	BARUMUN	1	1	0	2	0.8
5	ULU BARUMUN	1	1	0	2	0.8
6	LUBUK BARUMUN	1	1	0	2	0.8
7	SOSA	1	1	0	2	0.8
8	BATANG LUBU SUTAN	1	1	0	2	0.8
9	HUTA RAJA TINGGI	1	1	1	3	1.0
10	BARUMUN TENGAH	1	0	0	1	0.4
11	HURISTAK	1	1	0	2	0.8
12	SIMANGAMBAT	1	1	0	2	0.8
13	BATANG ONANG	1	0	0	1	0.4
14	PADANG SIDEMPUAN TIMUR	1	2	0	3	1.2
15	SIAIS	2	1	0	3	1.2
16	PADANG SIDEMPUAN BARAT	1	1	1	3	1.0
17	BATANG TORU	1	1	0	2	0.8
18	MARANCAR	1	1	0	2	0.8
19	SIPIROK	1	1	1	3	1.0
20	ARSE	1	0	1	2	0.6
21	PADANG BOLAK JULU	1	0	0	1	0.4
22	PADANG BOLAK	1	0	0	1	0.4
23	PORTIBI	1	1	0	2	0.8
24	HALONGONAN	1	0	0	1	0.4
25	SAIPAR DOLOK HOLE	1	0	0	1	0.4
26	AEK BILAH	1	1	0	2	0.8
27	DOLOK	1	0	0	1	0.4
28	DOLOK SIGOMPULON	1	0	0	1	0.4

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	LUMUT	2	2	1	5	1.8
2	BADIRI	2	2	1	5	1.8
3	SIBABANGUN	1	2	1	4	1.4
4	SIBOLGA	1	1	1	3	1.0
5	TUKKA	1	0	2	3	0.8
6	TAPIAN NAULI	1	1	1	3	1.0
7	SITAHUIS	1	0	1	2	0.6
8	KOLANG	1	0	1	2	0.6
9	SORKAM	1	1	1	3	1.0
10	SORKAM BARAT	1	1	1	3	1.0
11	BARUS	1	0	1	2	0.6
12	SOSOR GODANG	1	1	1	3	1.0
13	ANDAM DEWI	1	1	1	3	1.0
14	MANDUAMAS	1	1	1	3	1.0
15	SIRANDURUNG	1	0	0	1	0.4

KABUPATEN TAPANULI UTARA

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	PARMONANGAN	1	1	0	2	0.8
2	ADIANKOTING	1	0	0	1	0.4
3	SIPOHOLON	1	0	0	1	0.4
4	SIATAS BARITA	1	0	0	1	0.4
5	TARUTUNG	1	1	0	2	0.8
6	PAHAE JULU	1	0	0	1	0.4
7	PAHAE JAE	1	0	0	1	0.4
8	PURBATUA	1	0	0	1	0.4
9	SIMANGUMBAN	1	0	0	1	0.4
10	PANGARIBUAN	1	1	0	2	0.8
11	GAROGA	1	0	0	1	0.4
12	SIPAHUTAR	1	1	0	2	0.8
13	SIBORONG-BORONG	1	1	0	2	0.8
14	PAGARAN	1	1	0	2	0.8
15	MUARA	1	0	0	1	0.4

KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	BALIGE	1	2	0	3	1.2
2	LAGU BOTI	1	1	0	2	0.8
3	HABINSARAN	1	1	0	2	0.8
4	BORBOR	1	2	0	3	1.2
5	SIGUMPAR	1	2	0	3	1.2
6	SILAEN	1	0	0	1	0.4
7	PORSEA	1	0	0	1	0.4
8	PINTI POHAN MARANTI	1	0	0	1	0.4
9	LUMBAN JULU	1	0	0	1	0.4
10	ULUAN	1	0	0	1	0.4
11	AJIBATA	1	0	0	1	0.4

KABUPATEN LABUHAN BATU

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	SUNGAI KANAN	1	2	0	3	1.2
2	TORGAMBA	1	1	0	2	0.8
3	KOTA PINANG	1	1	0	2	0.8
4	SILANGKITANG	1	2	0	3	1.2
5	BILAH HULU	1	2	1	4	1.4
6	KAMPUNG RAKYAT	1	2	0	3	1.2
7	PANGKATAN	1	1	1	3	1.0
8	BILAH BARAT	1	0	0	1	0.4
9	NA IX-X	1	2	0	3	1.2
10	AEK NATAS	1	1	1	3	1.0
11	AEK KUO	1	1	0	2	0.8
12	MARBAU	1	2	2	5	1.6
13	BILAH HILIR	1	1	0	2	0.8
14	PANAI HULU	1	2	1	4	1.4
15	PANAI TENGAH	1	1	1	3	1.0
16	PANAI HILIR	1	1	1	3	1.0
17	KUALUH HILIR	1	2	0	3	1.2
18	KUALUH SELATAN	1	2	2	5	1.6
19	KUALUH HULU	1	2	1	4	1.4
20	KUALUH LEIDONG	1	1	0	2	0.8
21	RANTAU SELATAN	1	2	1	4	1.4
22	RANTAU UTARA	1	0	0	1	0.4

KABUPATEN ASAHAN

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	BANDAR PASIR MANDOGGE	1	2	0	3	1.2
2	BANDAR PULAU	1	1	0	2	0.8
3	PULAU RAKYAT	1	1	0	2	0.8
4	AEK KUASAN	1	1	0	2	0.8
5	SEI KEPAYANG	1	1	0	2	0.8
6	TANJUNG BALAI	1	1	0	2	0.8
7	SIMPANG EMPAT	1	1	0	2	0.8
8	AIR BATU	3	2	0	5	2.0
9	BUNTU PANE	2	2	1	5	1.8
10	MERANTI	1	1	0	2	0.8
11	AIR JOMAN	1	1	0	2	0.8
12	TANJUNG TIRAM	3	1	1	5	1.8
13	SEI BALAI	2	1	1	4	1.4
14	TALAWI	1	1	1	3	1.0
15	LIMA PULUH	1	1	0	2	0.8
16	AIR PUTIH	1	1	0	2	0.8
17	SEI SUKA	1	1	0	2	0.8
18	MEDANG DERAS	1	1	0	2	0.8
19	KISARAN BARAT	1	2	1	4	1.4
20	KISARAN TIMUR	1	2	0	3	1.2

KABUPATEN SIMALUNGUN

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	SILIMAKUTA	1	1	0	2	0.8
2	PURBA	1	0	0	1	0.4
3	HARANGGAOL HORISON	1	1	0	2	0.8
4	DOLOK PARMADAN	1	0	0	1	0.4
5	SIDAMANIK	1	1	0	2	0.8
6	PEMATANG SIDAMANIK	1	1	1	3	1.0
7	GIRSANG SP BOLON	1	1	1	3	1.0
8	TANAH JAWA	1	2	1	4	1.4
9	HATUNDUHAN	1	1	1	3	1.0
10	DOLOK PANRIBUAN	1	1	0	2	0.8
11	JORLANG HATARAN	1	2	1	4	1.4
12	PANE	1	1	1	3	1.0
13	PANOMBEIAN PANEI	1	1	1	3	1.0
14	RAYA	1	2	1	4	1.4
15	DOLOK SILAU	2	1	1	4	1.4
16	SILAU KAHEAN	1	1	0	2	0.8
17	RAYA KAHEAN	1	1	1	3	1.0
18	TAPIAN DOLOK	1	0	0	1	0.4
19	DOLOK BATUNAGGAR	1	2	1	4	1.4
20	SIANTAR	1	1	1	3	1.0
21	GUNUNG MALALELA	1	1	1	3	1.0
22	GUNUNG MALIGAS	1	1	1	3	1.0
23	HUTABAYU RAJA	1	1	1	3	1.0
24	JAWAMARAJA BAH JB	1	1	1	3	1.0
25	PEMATANG BANDAR	1	1	1	3	1.0
26	BANDAR HULUAN	1	1	1	3	1.0
27	BANDAR	1	1	1	3	1.0
28	BANDAR MASILAM	1	1	1	3	1.0
29	BOSAR MALIGAS	1	2	1	4	1.4
30	UJUNG PADANG	1	1	1	3	1.0

KABUPATEN DAIRI

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	SIDIKALANG	1	1	0	2	0.8
2	PARBULUAN	1	1	0	2	0.8
3	SUMBUL	1	1	0	2	0.8
4	SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	1	0	0	1	0.4
5	LAE PARIRA	1	0	0	1	0.4
6	SIEMPAT NEMPU	1	1	0	2	0.8
7	SIEMPAT NEMPU HULU	1	0	0	1	0.4
8	SIEMPAT NEMPU HILIR	1	0	0	1	0.4
9	TIGA LINGGA	1	2	0	3	1.2
10	PEGAGAN HILIR	1	1	0	2	0.8
11	TANAH PINEM	1	2	0	3	1.2

KABUPATEN KARO

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	MARDINDING	1	1	0	2	0.8
2	LAUBALENG	1	0	0	1	0.4
3	TIGA BINANGA	1	0	0	1	0.4
4	JUHAR	1	1	0	2	0.8
5	MUNTE	1	1	0	2	0.8
6	KUTA BULUH	1	0	0	1	0.4
7	PAYUNG	1	1	0	2	0.8
8	SIMPANG EMPAT	1	0	0	1	0.4
9	KABANJAHE	1	1	0	2	0.8
10	BERASTAGI	1	2	0	3	1.2
11	TIGA PANAH	1	1	0	2	0.8
12	MEREK	1	1	0	2	0.8
13	BARUSJAHE	1	1	0	2	0.8

KABUPATEN DELI SERDANG

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	GUNUNG MERIAH	1	0	1	2	0.6
2	STM HULU	1	0	1	2	0.6
3	SIBOLANGIT	1	0	1	2	0.6
4	KUTALIMBARU	1	0	1	2	0.6
5	PANCUR BATU	1	1	1	3	1.0
6	NAMO RAMBE	1	1	1	3	1.0
7	BIRU-BIRU	1	1	2	4	1.2
8	STM HILIR	1	1	1	3	1.0
9	BANGUN PURBA	1	1	1	3	1.0
10	GALANG	1	1	2	4	1.2
11	TANJUNG MORAWA	1	1	2	4	1.2
12	PATUMBAK	1	2	2	5	1.6
13	DELI TUA	1	1	2	4	1.2
14	SUNGGAL	2	1	1	4	1.4
15	HAMPARAN PERAK	1	2	2	5	1.6
16	LABUHAN DELI	3	2	2	7	2.4
17	PERCUT SEI TUAN	1	1	2	4	1.2
18	BATANG KUIS	1	2	2	5	1.6
19	PANTAI LABU	1	1	1	3	1.0
20	BERINGIN	1	1	2	4	1.2
21	LUBUK PAKAM	1	1	2	4	1.2
22	PAGAR MARBAU	1	0	1	2	0.6

KABUPATEN LANGKAT

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	BOHOROK	2	1	2	5	1.6
2	SALAPIAN	1	1	3	5	1.4
3	SEI BINGAI	3	2	2	7	2.4
4	KUALA	1	1	2	4	1.2
5	SELESAI	1	1	2	4	1.2
6	BINJAI	1	2	2	5	1.6
7	STABAT	1	2	2	5	1.6
8	WAMPU	1	1	2	4	1.2
9	BATANG SERANGAN	2	1	2	5	1.6
10	SAWIT SEBERANG	1	2	3	6	1.8
11	PADANG TUALANG	1	1	3	5	1.4
12	HINAI	1	1	3	5	1.4
13	SECANGGUNG	1	2	2	5	1.6
14	TANJUNG PURA	2	2	2	6	2.0
15	GEBANG	1	2	2	5	1.6
16	BABALAN	3	1	3	7	2.2
17	SEI LEPAN	1	1	3	5	1.4
18	BRANDAN BARAT	1	1	2	4	1.2
19	BESITANG	1	1	2	4	1.2
20	PANGKALAN SUSU	1	1	3	5	1.4

KABUPATEN NIAS SELATAN

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	PULAU-PULAU BATU	1	0	0	1	0.4
2	HIBALA	1	0	0	1	0.4
3	TELUK DALAM	3	2	0	5	2.0
4	AMANDRAYA	3	2	0	5	2.0
5	LAHUSA	1	1	0	2	0.8
6	GOMO	1	2	0	3	1.2
7	LOLOMATUA	1	1	0	2	0.8
8	LOLO WA'U	1	1	0	2	0.8

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	PAKKAT	1	0	0	1	0.4
2	ONAN GANJANG	1	0	0	1	0.4
3	SIJAMAPOLANG	1	0	0	1	0.4
4	LINTONG NIHUTA	1	0	0	1	0.4
5	PARANGINAN	3	1	0	4	1.6
6	DOLOK SANGGUL	3	2	0	5	2.0
7	PARLILITAN	1	1	0	2	0.8
8	TARA BINTANG	1	1	0	2	0.8
9	POLLUNG	1	1	0	2	0.8
10	BAKTI RAJA	1	1	0	2	0.8

KABUPATEN PAKPAK BARAT

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	SALAK	1	0	0	1	0.4
2	SITELLU TALI URANG JEHE	1	1	0	2	0.8
3	KERAJAAN	1	1	0	2	0.8

KABUPATEN SAMOSIR

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	HARIAN	1	0	0	1	0.4
2	SIANJUR MULA MULA	1	0	0	1	0.4
3	NAINGGOLAN	1	0	0	1	0.4
4	ONAN RUNGGU	1	0	0	1	0.4
5	PALIPI	1	0	0	1	0.4
6	SITO-TIO	1	0	0	1	0.4
7	PANGURURAN	1	1	0	2	0.8
8	RONGGUR NIHUTA	1	2	0	3	1.2
9	SIMANINDO	1	1	0	2	0.8

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	KOTARIH	1	1	2	4	1.2
2	DOLOK MASIHUL	1	1	2	4	1.2
3	SIPISPIS	1	1	2	4	1.2
4	DOLOK MERAWAN	1	1	2	4	1.2
5	TEBINGTINGGI	1	1	1	3	1.0
6	BANDAR KHALIPAH	1	1	2	4	1.2
7	TANJUNG BERINGIN	2	1	1	4	1.4
8	TELUK MENGGUDU	1	2	1	4	1.4
9	SEI RAMPAH	1	2	1	4	1.4
10	PERBAUNGAN	1	1	2	4	1.2
11	PANTAI CERMIN	1	2	2	5	1.6

KOTA SIBOLGA

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	SIBOLGA UTARA	1	1	2	4	1.2
2	SIBOLGA KOTA	2	2	1	5	1.8
3	SIBOLGA SELATAN	1	1	2	4	1.2
4	SIBOLGA SAMBAS	2	2	2	6	2.0

KOTA TANJUNG BALAI

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	DATUK BANDAR	1	2	2	5	1.6
2	TG. BALAI SELATAN	1	1	3	5	1.4
3	TG. BALAI UTARA	1	2	2	5	1.6
4	S. TUALANG RASO	2	1	2	5	1.6
5	TELUK NIBUNG	1	2	1	4	1.4

KOTA PEMATANG SIANTAR

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	SIANTAR MARIHAT	1	1	3	5	1.4
2	SIANTAR SELATAN	2	1	2	5	1.6
3	SIANTAR BARAT	1	1	2	4	1.2
4	SIANTAR UTARA	1	1	2	4	1.2
5	SIANTAR TIMUR	1	1	2	4	1.2
6	SIANTAR MARTOBA	1	2	2	5	1.6

KOTA TEBING TINGGI

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	PADANG HULU	1	2	1	4	1.4
2	RAMBUTAN	1	2	1	4	1.4
3	PADANG HILIR	1	2	1	4	1.4

KOTA MEDAN

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	MEDAN TUNTUNGAN	1	1	3	5	1.4
2	MEDAN JOHOR	2	2	2	6	2.0
3	MEDAN AMPLAS	1	1	3	5	1.4
4	MEDAN DENAI	2	1	3	6	1.8
5	MEDAN AREA	1	1	2	4	1.2
6	MEDAN KOTA	2	1	3	6	1.8
7	MEDAN MAIMUN	2	1	2	5	1.6
8	MEDAN POLONIA	2	1	2	5	1.6
9	MEDAN BARU	1	1	3	5	1.4
10	MEDAN SELAYANG	1	1	3	5	1.4
11	MEDAN SUNGGAL	3	2	2	7	2.4
12	MEDAN HELVETIA	1	2	3	6	1.8
13	MEDAN PETISAH	1	2	3	6	1.8
14	MEDAN BARAT	1	1	2	4	1.2
15	MEDAN TIMUR	1	2	3	6	1.8
16	MEDAN PERJUANGAN	1	1	3	5	1.4
17	MEDAN TEMBUNG	3	2	3	8	2.6
18	MEDAN DELI	2	1	3	6	1.8
19	MEDAN LABUHAN	1	2	2	5	1.6
20	MEDAN MARELAN	1	2	2	5	1.6
21	MEDAN KOTA BELAWAN	3	2	3	8	2.6

KOTA BINJAI

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	BINJAI SELATAN	1	2	2	5	1.6
2	BINJAI KOTA	1	2	3	6	1.8
3	BINJAI TIMUR	1	1	2	4	1.2
4	BINJAI UTARA	1	2	2	5	1.6
5	BINJAI BARAT	1	2	2	5	1.6

KOTA PADANG SIDIMPUAN

NO,	KECAMATAN	KONFLIK	KEJAHATAN	PENGANGGURAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	P SIDEMPUAN TENGGARA	1	2	1	4	1.4
2	P SIDEMPUAN SELATAN	3	2	1	6	2.2
3	P SIDEMPUAN BATUNADUA	1	2	1	4	1.4
4	P SIDEMPUAN UTARA	3	1	0	4	1.6
5	P SIDEMPUAN HUTAIMBARU	1	1	1	3	1.0

<http://sumut.bps.go.id>

Banyaknya Peristiwa Kejahatan/Pelanggaran, Yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran tiap bulan tahun 2003.

No.	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Nias		Mandailing Natal		Tapanuli Selatan		Tapanuli Tengah		Tapanuli Utara		Toba Samosir		Labuhan Batu		Asahan		Simalungun		Jumlah	
		Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan
1.	Perkosaan/ Perjinahan	6	5	4	3	3	3	3	1	4	4	20	12	17	9	18	8	11	3	86	48
2.	Perjudian	5	5	1	1	9	9	0	0	0	0	6	4	10	10	48	43	16	3	95	75
3.	Penculikan	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0	3	0	10	3
4.	Pembunuhan	23	8	1	0	1	1	1	0	2	2	3	2	15	11	27	16	12	10	85	50
5.	Bunuh Diri	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	11	1
6.	Penganiayaan	133	83	32	19	15	14	8	4	22	22	192	80	222	119	278	175	339	156	1141	672
7.	Pencurian Ringan	33	14	13	8	5	2	3	2	21	21	45	27	46	41	79	69	27	26	272	210
8.	Pencurian dengan kekerasan	4	2	2	0	3	2	0	0	0	0	13	12	59	23	116	33	70	37	267	109
9.	Pencurian dengan pemberatan	14	17	0	0	22	21	0	0	0	0	59	43	368	246	337	399	343	188	1143	914
10.	Penghiniaan	23	17	0	0	1	0	0	0	3	3	4	6	12	8	25	25	0	0	68	59
11.	Pemerasan	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	31	30	30	22	7	5	9	8	77	67
12.	Penggelapan	3	1	4	2	1	1	0	0	4	4	33	27	48	20	95	35	60	20	248	110
13.	Kejahatan Narkotik	3	4	21	20	0	0	0	0	3	3	29	39	59	68	117	129	28	29	260	292

No.	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Nias		Mandailing Natal		Tapanuli Selatan		Tapanuli Tengah		Tapanuli Utara		Toba Samosir		Labuhan Batu		Asahan		Simalungun		Jumlah	
		Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan
14.	Pencurian Kendaraan Bermotor	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	92	8	101	24	78	10	290	55
15.	Penyelundupan	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	24	14	0	0	28	17
16.	Perkelahian antar Kelompok Warga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Perkelahian Warga dengan Aparat Keamanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Perkelahian Antar Suku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Perkelahian Antar Pemuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Perkelahian Antar Pelajar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Lain-lain	0	0	0	0	2	2	6	7	0	0	78	40	3	1	47	39	140	94	276	183

Banyaknya Peristiwa Kejahatan/Pelanggaran, Yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran tiap bulan tahun 2003.

No.	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Dairi		Karo		Deli Serdang		Langkat		Nias Selatan		Humbang Hasundutan		Pakpak Barat		Samosir		Serdang Bedagai		Jumlah	
		Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru- skan ke Kejak- saan
1.	Perkosaan/ Perjinahan	2	1	2	1	7	4	44	22											55	28
2.	Perjudian	0	0	2	0	13	15	22	11											37	26
3.	Penculikan	0	0	0	1	2	0	15	3											16	5
4.	Pembunuhan	5	5	0	0	8	10	8	4											21	19
5.	Bunuh Diri	3	0	0	0	5	4	0	0	Masih bergabung dengan kab. induk										8	4
6.	Penganiayaan	13	9	0	0	211	92	354	67											578	168
7.	Pencurian Ringan	2	1	6	1	46	33	67	38											121	73
8.	Pencurian dengan kekerasan	0	0	4	0	50	13	51	16											105	29
9.	Pencurian dengan pemberatan	7	5	8	1	288	160	500	284											803	450
10.	Penghinaan	2	2	1	0	0	0	21	6											24	8
11.	Pemerasan	0	0	4	1	45	27	23	7											72	35
12.	Penggelapan	0	0	2	0	43	32	98	23											143	55
13.	Kejahatan Narkotik	15	14	2	3	161	90	110	117											288	224

No.	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Dairi		Karo		Deli Serdang		Langkat		Nias Selatan		Humbang Hasundutan		Pakpak Barat		Samosir		Serdang Bedagai		Jumlah		
		Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan
14.	Pencurian Kendaraan Bermotor	0	0	3	0	53	3	30	5												86	8
15.	Penyelundupan	0	0	1	0	0	0	0	0												1	0
16.	Perkelahian antar Kelompok Warga	0	0	0	0	0	0	0	0	Masih bergabung dengan kab. induk										0	0	
17.	Perkelahian Warga dengan Aparat Keamanan	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0	
18.	Perkelahian Antar Suku	0	0	0	0	0	0	0	0												0	0
19.	Perkelahian Antar Pemuda	0	0	0	0	0	0	0	0												0	0
20.	Perkelahian Antar Pelajar	0	0	0	0	0	0	0	0												0	0
21.	Lain-lain	2	1	21	9	279	128	223	25												525	163

Banyaknya Peristiwa Kejahatan/Pelanggaran, Yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran tiap bulan tahun 2003.

No.	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Sibolga		Tanjung Balai		Pematang Siantar		Tebing Tinggi		Medan		Binjai		Padang Sidempuan		Jumlah	
		Dila- porkan	Diterusk an ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterusk an ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterusk an ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterusk an ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterusk an ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterusk an ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterusk an ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterusk an ke Kejak- saan
1.	Perkosaan/ Perjinahan	1	1	2	2	15	3	5	1	38	36	6	1	3	1	70	45
2.	Perjudian	72	56	11	11	16	1	13	14	11	6	5	6	62	65	190	159
3.	Penculikan	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	6	0
4.	Pembunuhan	0	1	1	0	13	11	0	0	20	12	9	4	7	7	50	35
5.	Bunuh Diri	0	0	1	1	0	0	5	1	0	0	0	0	2	0	8	2
6.	Penganiayaan	170	85	14	5	329	162	0	0	419	201	120	37	143	70	1195	560
7.	Pencurian Ringan	47	30	0	0	27	26	0	0	126	45	47	14	18	17	265	132
8.	Pencurian dengan kekerasan	91	46	3	2	70	37	0	0	170	54	30	5	1	2	365	146
9.	Pencurian dengan pemberatan	0	0	17	5	309	153	120	37	345	130	151	41	58	42	1000	408
10.	Penghinaan	0	0	0	0	0	0	8	8	10	14	10	6	6	4	34	32
11.	Pemerasan	5	3	0	0	15	5	25	7	50	33	11	17	25	8	131	73
12.	Penggelapan	26	11	4	1	60	20	22	8	133	96	35	10	18	8	298	154
13.	Kejahatan Narkotik	38	45	13	15	28	28	31	27	151	146	61	13	52	62	374	336

No.	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Sibolga		Tanjung Balai		Pematang Siantar		Tebing Tinggi		Medan		Binjai		Padang Sidempuan		Jumlah	
		Dila- porkan	Diterusk an ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterusk an ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterusk an ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterusk an ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterusk an ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterusk an ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterusk an ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterusk an ke Kejak- saan
14.	Pencurian Kendaraan Bermotor	11	11	40	12	78	7	18	10	404	34	77	5	41	11	668	90
15.	Penyelundupan	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
16.	Perkelahian antar Kelompok Warga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Perkelahian Warga dengan Aparat Keamanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Perkelahian Antar Suku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Perkelahian Antar Pemuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Perkelahian Antar Pelajar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Lain-lain	96	56	0	0	141	94	173	71	278	200	251	51	283	213	1222	685

Banyaknya Peristiwa Kejahatan/Pelanggaran, Yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran tiap bulan tahun 2004.

No.	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Nias		Mandailing Natal		Tapanuli Selatan		Tapanuli Tengah		Tapanuli Utara		Toba Samosir		Labuhan Batu		Asahan		Simalungun		Jumlah	
		Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan
1.	Perkosaan/ Perjinahan	1	1	1	12	2	2	2	1	5	5	8	6	17	9	19	10	16	8	71	54
2.	Perjudian	0	0	12	0	11	11	5	0	14	14	19	18	22	21	41	40	59	45	183	149
3.	Penculikan	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	1	8	4
4.	Pembunuhan	10	6	1	0	2	2	0	1	0	0	2	2	10	16	11	9	8	9	44	45
5.	Bunuh Diri	0	0	1	4	2	2	0	0	1	1	1	1	7	0	4	0	0	0	16	8
6.	Penganiayaan	80	48	15	2	12	6	5	4	38	38	106	57	205	74	210	114	133	130	804	473
7.	Pencurian Ringan	14	5	4	0	0	0	4	4	20	20	22	15	28	13	58	48	67	50	217	155
8.	Pencurian dengan kekerasan	4	1	0	0	2	2	1	1	0	0	13	3	34	14	52	15	51	36	157	82
9.	Pencurian dengan pemberatan	2	4	1	0	22	21	3	1	0	0	37	32	264	200	113	150	324	270	766	678
10.	Penghinaan	27	20	2	0	0	0	0	0	2	2	6	4	21	4	12	13	0	0	70	43
11.	Pemerasan	10	5	1	0	1	1	0	0	4	4	3	4	14	3	0	0	25	9	58	26
12.	Penggelapan	4	1	5	4	1	1	1	2	2	2	19	9	64	23	71	37	42	21	209	100
13.	Kejahatan Narkotik	0	0	0	0	2	2	0	0	5	5	0	11	22	31	16	26	0	0	45	75

No.	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Nias		Mandailing Natal		Tapanuli Selatan		Tapanuli Tengah		Tapanuli Utara		Toba Samosir		Labuhan Batu		Asahan		Simalungun		Jumlah	
		Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan
14.	Pencurian Kendaraan Bermotor	4	3	0	0	1	1	0	0	1	3	13	3	64	7	33	13	37	4	153	34
15.	Penyelundupan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	63	10	12	124	75
16.	Perkelahian antar Kelompok Warga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Perkelahian Warga dengan Aparat Keamanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Perkelahian Antar Suku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Perkelahian Antar Pemuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Perkelahian Antar Pelajar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Lain-lain	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	16	12	0	0	50	12	81	66	152	93

No.	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Dairi		Karo		Deli Serdang		Langkat		Nias Selatan		Humbang Hasundutan		Pakpak Barat		Samosir		Serdang Bedagai		Jumlah		
		Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan	Diteru skan ke Kejak-saan	Dila-porkan
14.	Pencurian Kendaraan Bermotor	0	0	11	1	51	5	12	0												74	6
15.	Penyelundupan	0	0	2	1	0	0	0	0												2	1
16.	Perkelahian antar Kelompok Warga	0	0	0	0	0	0	0	0	Masih bergabung dengan kab. induk										0	0	
17.	Perkelahian Warga dengan Aparat Keamanan	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0	
18.	Perkelahian Antar Suku	0	0	0	0	0	0	0	0												0	0
19.	Perkelahian Antar Pemuda	0	0	0	0	0	0	0	0												0	0
20.	Perkelahian Antar Pelajar	0	0	0	0	0	0	0	0												0	0
21.	Lain-lain	0	0	129	45	182	98	233	33												544	176

Banyaknya Peristiwa Kejahatan/Pelanggaran, Yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran tiap bulan tahun 2004.

No.	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Sibolga		Tanjung Balai		Pematang Siantar		Tebing Tinggi		Medan		Binjai		Padang Sidempuan		Jumlah	
		Dila- porkan	Diterus kan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterus kan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterus kan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterus kan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterus kan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterus kan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterus kan ke Kejak- saan
1.	Perkosaan/ Perjinahan	1	0	0	0	16	8	2	0	11	9	3	2	0	0	33	19
2.	Perjudian	44	40	0	0	49	45	8	10	6	2	29	7	19	17	155	121
3.	Penculikan	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	1	0	0	1	6	2
4.	Pembunuhan	1	0	0	0	8	9	0	1	16	8	4	5	1	5	30	28
5.	Bunuh Diri	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	1	5	1
6.	Penganiayaan	84	22	13	6	232	140	0	0	449	161	71	22	103	48	952	399
7.	Pencurian Ringan	17	8	2	1	54	50	0	0	98	41	6	7	30	5	207	112
8.	Pencurian dengan kekerasan	42	12	1	1	51	36	0	0	121	48	29	3	2	5	246	105
9.	Pencurian dengan pemberatan	0	0	9	6	214	152	71	41	283	131	70	31	51	29	708	390
10.	Penghinaan	12	1	1	0	0	0	0	1	32	3	14	1	6	2	65	8
11.	Pemerasan	1	0	6	0	24	9	9	3	31	14	2	1	9	6	82	33
12.	Penggelapan	6	10	6	4	42	21	25	5	157	64	21	7	18	8	275	119
13.	Kejahatan Narkotik	9	14	4	4	0	0	116	54	51	49	35	37	13	16	228	174

No.	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Sibolga		Tanjung Balai		Pentang Siantar		Tebing Tinggi		Medan		Binjai		Padang Sidempuan		Jumlah	
		Dila- porkan	Diterus kan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diteru skan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterus kan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterus kan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterus kan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterus kan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterus kan ke Kejak- saan	Dila- porkan	Diterus kan ke Kejak- saan
14.	Pencurian Kendaraan Bermotor	4	0	4	2	37	4	22	0	346	12	39	8	17	5	469	31
15.	Penyelundupan	0	0	0	0	10	12	0	0	19	0	1	0	0	0	30	12
16.	Perkelahian antar Kelompok Warga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Perkelahian Warga dengan Aparat Keamanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Perkelahian Antar Suku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Perkelahian Antar Pemuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Perkelahian Antar Pelajar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Lain-lain	25	8	0	0	81	66	7	0	132	88	108	42	337	183	690	387

Banyaknya Peristiwa Kejahatan/Pelanggaran, Yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran tiap bulan tahun 2003.

Polsek :

Polres :

No.	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Nias		Madina		Tapsel		Tapteng		Taput		Tobasa		L. Batu		Asahan		Simalungun		Jumlah		
		Dilaporkan	Diteruskan ke Kejaksaan																			
22.	Perkosaan/ Perjinahan	6	5	4	3	3	3	3	3	1	4	4	20	12	17	9	18	8	11	3		
23.	Perjudian	5	5	1	1	9	9	0	0	0	0	6	4	10	10	48	43	16	3			
24.	Penculikan	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0	3	0			
25.	Pembunuhan	23	8	1	0	1	1	1	0	2	2	3	2	15	11	27	16	12	10			
26.	Bunuh Diri	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0			
27.	Penganiayaan	133	83	32	19	15	14	8	4	22	22	192	80	222	119	278	175	339	156			
28.	Pencurian Ringan	33	14	13	8	5	2	3	2	21	21	45	27	46	41	79	69	27	26			
29.	Pencurian dengan kekerasan	4	2	2	0	3	2	0	0	0	0	13	12	59	23	116	33	70	37			
30.	Pencurian dengan pemberatan	14	17	0	0	22	21	0	0	0	0	59	43	368	246	337	399	343	188			
31.	Penghinaan	23	17	0	0	1	0	0	0	3	3	4	6	12	8	25	25	0	0			
32.	Pemerasan	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	31	30	30	22	7	5	9	8			
33.	Penggelapan	3	1	4	2	1	1	0	0	4	4	33	27	48	20	95	35	60	20			
34.	Kejahatan Narkotik	3	4	21	20	0	0	0	0	3	3	29	39	59	68	117	129	28	29			

No.	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Nias		Madina		Tapsel		Tapteng		Taput		Tobasa		L. Batu		Asahan		Simalungun		Jumlah	
		Dilaporkan	Diteruskan ke Kejaksaan																		
35.	Pencurian Kendaraan Bermotor	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	92	8	101	24	78	10		
36.	Penyelundupan	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	24	14	0	0		
37.	Perkelahian antar Kelompok Warga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38.	Perkelahian Warga dengan Aparat Keamanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39.	Perkelahian Antar Suku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40.	Perkelahian Antar Pemuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41.	Perkelahian Antar Pelajar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42.	Lain-lain	0	0	0	0	2	2	6	7	0	0	78	40	3	1	47	39	140	94		

Banyaknya Peristiwa Kejahatan/Pelanggaran, Yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran tiap bulan tahun 2003.

Polsek :

Polres :

No.	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Sibolga		T.Balai		P.Siantar		T.Tinggi		Medan		Binjai		P. Sidempuan		Jumlah	
		Dilaporkan	Diteruskan ke Kejaksaan	Dilaporkan	Diteruskan ke Kejaksaan	Dilaporkan	Diteruskan ke Kejaksaan										
22.	Perkosaan/ Perjinahan	1	1	2	2	15	3	5	1	38	36	6	1	3	1		
23.	Perjudian	72	56	11	11	16	1	13	14	11	6	5	6	62	65		
24.	Penculikan	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0		
25.	Pembunuhan	0	1	1	0	13	11	0	0	20	12	9	4	7	7		
26.	Bunuh Diri	0	0	1	1	0	0	5	1	0	0	0	0	2	0		
27.	Penganiayaan	170	85	14	5	329	162	0	0	419	201	120	37	143	70		
28.	Pencurian Ringan	47	30	0	0	27	26	0	0	126	45	47	14	18	17		
29.	Pencurian dengan kekerasan	91	46	3	2	70	37	0	0	170	54	30	5	1	2		
30.	Pencurian dengan pemberatan	0	0	17	5	309	153	120	37	345	130	151	41	58	42		
31.	Penghinaan	0	0	0	0	0	0	8	8	10	14	10	6	6	4		
32.	Pemerasan	5	3	0	0	15	5	25	7	50	33	11	17	25	8		
33.	Penggelapan	26	11	4	1	60	20	22	8	133	96	35	10	18	8		
34.	Kejahatan Narkotik	38	45	13	15	28	28	31	27	151	146	61	13	52	62		

No.	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Sibolga		T.Balai		P.Siantar		T.Tinggi		Medan		Binjai		P. Sidempuan		Jumlah	
		Dilaporkan	Diteruskan ke Kejaksaaan	Dilaporkan	Diteruskan ke Kejaksaaan	Dilaporkan	Diteruskan ke Kejaksaaan										
35.	Pencurian Kendaraan Bermotor	11	11	40	12	78	7	18	10	404	34	77	5	41	11		
36.	Penyelundupan	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37.	Perkelahian antar Kelompok Warga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38.	Perkelahian Warga dengan Aparat Keamanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39.	Perkelahian Antar Suku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40.	Perkelahian Antar Pemuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41.	Perkelahian Antar Pelajar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42.	Lain-lain	96	56	0	0	141	94	173	71	278	200	251	51	283	213		

.....tgl.....

Kapolsek

(.....)

Banyaknya Peristiwa Kejahatan/Pelanggaran, Yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran tiap bulan tahun 2004.

Polsek :

Polres :

No.	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Nias		Madina		Tapsel		Tapteng		Taput		Tobasa		L. Batu		Asahan		Simalungun		Jumlah	
		Dilaporkan	Diteruskan ke Kejaksaan																		
22.	Perkosaan/ Perjinahan	1	1	1	12	2	2	2	1	5	5	8	6	17	9	19	10	16	8		
23.	Perjudian	0	0	12	0	11	11	5	0	14	14	19	18	22	21	41	40	59	45		
24.	Penculikan	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	1		
25.	Pembunuhan	10	6	1	0	2	2	0	1	0	0	2	2	10	16	11	9	8	9		
26.	Bunuh Diri	0	0	1	4	2	2	0	0	1	1	1	1	7	0	4	0	0	0		
27.	Penganiayaan	80	48	15	2	12	6	5	4	38	38	106	57	205	74	210	114	133	130		
28.	Pencurian Ringan	14	5	4	0	0	0	4	4	20	20	22	15	28	13	58	48	67	50		
29.	Pencurian dengan kekerasan	4	1	0	0	2	2	1	1	0	0	13	3	34	14	52	15	51	36		
30.	Pencurian dengan pemberatan	2	4	1	0	22	21	3	1	0	0	37	32	264	200	113	150	324	270		
31.	Penghinaan	27	20	2	0	0	0	0	0	2	2	6	4	21	4	12	13	0	0		
32.	Pemerasan	10	5	1	0	1	1	0	0	4	4	3	4	14	3	0	0	25	9		
33.	Penggelapan	4	1	5	4	1	1	1	2	2	2	19	9	64	23	71	37	42	21		
34.	Kejahatan Narkotik	0	0	0	0	2	2	0	0	5	5	0	11	22	31	16	26	0	0		

No.	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Nias		Madina		Tapsel		Tapteng		Taput		Tobasa		L. Batu		Asahan		Simalungun		Jumlah	
		Dilaporkan	Diteruskan ke Kejaksaan																		
35.	Pencurian Kendaraan Bermotor	4	3	0	0	1	1	0	0	1	3	13	3	64	7	33	13	37	4		
36.	Penyelundupan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	63	10	12		
37.	Perkelahian antar Kelompok Warga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38.	Perkelahian Warga dengan Aparat Keamanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39.	Perkelahian Antar Suku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40.	Perkelahian Antar Pemuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41.	Perkelahian Antar Pelajar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42.	Lain-lain	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	16	12	0	0	50	12	81	66		

Banyaknya Peristiwa Kejahatan/Pelanggaran, Yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran tiap bulan tahun 2004.

Polsek :

Polres :

No.	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Sibolga		T.Balai		P.Siantar		T.Tinggi		Medan		Binjai		P. Sidempuan		Jumlah	
		Dilaporkan	Diteruskan ke Kejaksaan	Dilaporkan	Diteruskan ke Kejaksaan	Dilaporkan	Diteruskan ke Kejaksaan										
22.	Perkosaan/ Perjinahan	1	0	0	0	16	8	2	0	11	9	3	2	0	0		
23.	Perjudian	44	40	0	0	49	45	8	10	6	2	29	7	19	17		
24.	Penculikan	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	1	0	0	1		
25.	Pembunuhan	1	0	0	0	8	9	0	1	16	8	4	5	1	5		
26.	Bunuh Diri	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	1		
27.	Penganiayaan	84	22	13	6	232	140	0	0	449	161	71	22	103	48		
28.	Pencurian Ringan	17	8	2	1	54	50	0	0	98	41	6	7	30	5		
29.	Pencurian dengan kekerasan	42	12	1	1	51	36	0	0	121	48	29	3	2	5		
30.	Pencurian dengan pemberatan	0	0	9	6	214	152	71	41	283	131	70	31	51	29		
31.	Penghinaan	12	1	1	0	0	0	0	1	32	3	14	1	6	2		
32.	Pemerasan	1	0	6	0	24	9	9	3	31	14	2	1	9	6		
33.	Penggelapan	6	10	6	4	42	21	25	5	157	64	21	7	18	8		
34.	Kejahatan Narkotik	9	14	4	4	0	0	116	54	51	49	35	37	13	16		

No.	Jenis Kejahatan/ Pelanggaran	Sibolga		T.Balai		P.Siantar		T.Tinggi		Medan		Binjai		P. Sidempuan		Jumlah	
		Dilaporkan	Diteruskan ke Kejaksaan	Dilaporkan	Diteruskan ke Kejaksaan	Dilaporkan	Diteruskan ke Kejaksaan										
35.	Pencurian Kendaraan Bermotor	4	0	4	2	37	4	22	0	346	12	39	8	17	5		
36.	Penyelundupan	0	0	0	0	10	12	0	0	19	0	1	0	0	0		
37.	Perkelahian antar Kelompok Warga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38.	Perkelahian Warga dengan Aparat Keamanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39.	Perkelahian Antar Suku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40.	Perkelahian Antar Pemuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41.	Perkelahian Antar Pelajar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42.	Lain-lain	25	8	0	0	81	66	7	0	132	88	108	42	337	183		

.....tgl.....

Kapolsek

(.....)

masih bergabung dengan Kab. lama